



Dialog Hegemonik: Analisis Wacana Kritis atas Relasi Kuasa dalam Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pemimpin Media

Yoga Prabowo Pongdatu*¹ , Husin M. Al-Banjari² 

¹² Universitas Padjadjaran, Sumedang, 45360, Indonesia

*Corresponding Author: yoga22003@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 09 July 2025

Revised 10 December 2025

Accepted 14 January 2026

Available online 30 January 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Pongdatu, Y. P. & Al-Banjari, H. M. (2025). Dialog Hegemonik: Analisis Wacana Kritis atas Relasi Kuasa dalam Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pemimpin Media. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 18 (1), 49-56.

ABSTRACT

This study analyzes the power discourse practices in the dialogic encounter between President-elect Prabowo Subianto and six editors-in-chief of national media outlets. This is a qualitative study conducted through a library research approach. The analysis employs Norman Fairclough's three-dimensional Critical Discourse Analysis, comprising text, discourse practice, and sociocultural practice to investigate how power is constructed and reproduced through language within a forum claimed to be open and uncensored. Findings at the textual dimension reveal the use of populist diction, humor as a humanizing strategy, and claims of epistemic authority to build an image of a leader who is both competent and man of the people. At the discourse practice dimension, the study finds that the asymmetrical dialogue format allowed Prabowo to control the agenda and neutralize critical questions, while the media functioned as co-producers of the dominant discourse. The sociocultural practice dimension indicates that this meeting served as a "dialogic shield" to dampen public criticism, an arena for repositioning Prabowo's political identity from a military figure to a civilian statesman, and a means to reproduce hegemonic relations between political and media elites. This study concludes that the discourse of the meeting was hegemonic rather than dialogically symmetrical. Language was strategically utilized to restructure the legitimacy of power behind a facade of openness, implying a risk of deliberative democracy being replaced by controlled symbolic dialogue.

Keyword: Critical Discourse Analysis, Discourse of Power, Media Elite, Prabowo Subianto, Hegemony

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik wacana kekuasaan dalam pertemuan dialogis antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan enam pemimpin redaksi media nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Analisis dilakukan Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Norman Fairclough (teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural) untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dikonstruksikan dan direproduksi melalui bahasa dalam forum yang diklaim terbuka tanpa sensor. Hasil analisis pada dimensi teks menunjukkan penggunaan diksi populis, humor sebagai strategi pemanusiawian, dan klaim otoritas epistemik untuk membangun citra pemimpin yang merakyat dan kompeten. Pada dimensi praktik wacana, terungkap bahwa format dialog yang asimetris memungkinkan Prabowo mengendalikan agenda dan menetralkan pertanyaan kritis, sementara media berfungsi sebagai ko-produser wacana dominan. Dimensi praktik sosiokultural menunjukkan bahwa pertemuan ini berfungsi sebagai perisai dialogis untuk meredam kritik publik, sebagai arena reposisi identitas politik Prabowo dari figur militer ke negarawan sipil, dan mereproduksi relasi hegemonik antara elite politik dan elite media. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana pertemuan tersebut bersifat hegemonik, bukan dialogis-simetris. Bahasa secara strategis digunakan untuk menata ulang legitimasi kekuasaan di balik fasad keterbukaan, yang berimplikasi pada risiko tergantinya demokrasi deliberatif oleh dialog simbolik yang terkendali.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Elite Media, Hegemoni, Prabowo Subianto, Wacana Kekuasaan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.21867>

1. Pendahuluan

Dalam lanskap demokrasi kontemporer, interaksi antara elite politik dan elite media merupakan arena realitas politik dinegosiasikan, dikonstruksi, dan disebarluaskan kepada publik. Pertemuan antara seorang kepala eksekutif dengan para pemimpin redaksi media massa bukan sekadar peristiwa komunikasi rutin, melainkan sebuah praktik kekuasaan simbolik yang sarat makna (Haryatmoko, 2019). Forum semacam ini menjadi panggung strategis di mana wacana resmi pemerintah dibingkai dan legitimasi politik diperkuat melalui mekanisme yang tampak dialogis dan transparan. Namun, di balik fasad keterbukaan tersebut, sering kali tersembunyi relasi kuasa yang asimetris dan praktik hegemonik yang bertujuan mereproduksi dominasi (Fairclough, 2014).

Hal ini terjadi melalui peristiwa politik dan media pada 6 April 2025, ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto menginisiasi sebuah forum dialog dengan enam Pemimpin Redaksi (pemred) media nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam ini dirancang dalam format "ngobrol terbuka tanpa sensor" sebuah klaim yang secara sengaja menegaskan atmosfer informalitas dan transparansi, di mana para elite media seperti perwakilan dari Kompas, Detik.com, TV One, Grup EMTEK, IDN Times, dan Narasi TV diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan tanpa batasan tema. Agenda diskusi mencakup isu-isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan publik, mulai dari kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, hubungan sipil-militer, stabilitas ekonomi, hingga posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global. Momen yang direkam dan kemudian didistribusikan secara masif melalui kanal YouTube resmi Prabowo Subianto serta platform media para peserta ini. Pada permukaannya, tampak sebagai sebuah gestur komunikasi politik yang demokratis. Namun, di balik keterbukaan tersebut, terdapat sebuah mekanisme kompleks dalam praktik produksi dan reproduksi kekuasaan. Pertemuan ini bukan sekadar forum pertukaran informasi, melainkan sebuah arena di mana wacana kekuasaan secara aktif dibangun, dinegosiasikan, dan pada akhirnya, dilegitimasi.

Wacana, dalam kerangka pemikiran kritis, tidaklah netral. wacana merupakan praktik sosial yang secara inheren terkait dengan relasi kuasa (Fairclough, 2014). Bahasa bukanlah sekadar alat untuk merefleksikan realitas, melainkan instrumen yang secara aktif membentuk dan mengkonstruksi realitas itu sendiri, termasuk realitas politik. Dalam konteks pertemuan Hambalang, bahasa menjadi medium utama di mana Presiden Prabowo tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga secara strategis memposisikan dirinya, menaturalisasi ideologi pemerintahannya, dan mengendalikan narasi publik. Pilihan diksi, struktur kalimat, penggunaan metafora, hingga humor yang disisipkan dalam dialog, semuanya menjadi elemen semiotik yang berfungsi untuk membangun citra dan meneguhkan otoritas. Misalnya, klaim Prabowo bahwa pertemuan tersebut adalah "perbincangan terbuka tanpa sensor" merupakan sebuah tindakan diskursif yang bertujuan menciptakan persepsi transparansi, sekalipun format pertemuan itu sendiri dilakukan dengan ia menjadi tuan rumah sekaligus satu-satunya narasumber, hal ini secara langsung menempatkannya pada posisi dominan. Sesuai dengan wacana dari Gramsci, praktik ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat beroperasi secara halus, tidak melalui koersi fisik, melainkan melalui hegemoni wacana yang membentuk kesadaran dan persetujuan publik (Munfarida, 2023).

Signifikansi analisis terhadap peristiwa ini terletak pada kemampuannya untuk membongkar bagaimana kekuasaan simbolik bekerja dalam demokrasi kontemporer. Pertemuan elite eksekutif dengan elite media merupakan sebuah fenomena politik yang berfungsi sebagai saluran legitimasi. Media, dalam hal ini, tidak hanya bertindak sebagai penjaga gerbang informasi, tetapi juga berpotensi menjadi *Co-producer*. Kehadiran para pemimpin redaksi dari media-media memberikan stempel legitimasi pada narasi yang dibangun oleh Prabowo, yang kemudian direproduksi dan disebarluaskan kepada audiens yang lebih luas. Proses ini, yang disebut Fairclough sebagai intertekstualitas dan interdiskursivitas, menunjukkan bagaimana sebuah teks atau peristiwa wacana selalu terkait dengan teks-teks dan praktik-praktik diskursif lainnya, menciptakan sebuah jejaring makna yang memperkuat tatanan kekuasaan yang ada (Munfarida, 2023). Prabowo Subianto memiliki jejak historis yang panjang dan seringkali kontroversial, terutama terkait latar belakang militernya, praktik wacana semacam ini menjadi penting dilaksanakan olehnya. Pidato dan dialognya tidak hanya merepresentasikan agenda masa depan, tetapi juga merupakan upaya reposisi citra dari seorang tokoh militer menjadi seorang negarawan sipil yang demokratis, sebuah transformasi yang secara aktif dikonstruksi melalui bahasa.

Latar belakang politik Prabowo Subianto sendiri menyediakan konteks yang kaya untuk analisis ini. Sepanjang karier politiknya, ia secara konsisten menggunakan retorika populis dan nasionalis yang kuat. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pidato-pidatonya menggunakan kerangka Analisis Wacana

Kritis. Misalnya, analisis terhadap pidato-pidatonya pada pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan penggunaan strategi referensial dan prediksi untuk membangun identitas sebagai pejuang rakyat dan mengkritik lawan politik (Megawati, 2021). Studi lain menyoroti bagaimana pidato pelantikannya pada 2024 dirancang untuk membangun citra inklusif dan menekankan persatuan nasional melalui penggunaan nilai-nilai relasional dan ekspresif yang cermat (Rumaf et al., 2025). Wacana populisnya juga tercermin dalam glorifikasi "rakyat" dan penciptaan dikotomi moral antara elite dan rakyat biasa (Umam K, 2025). Dalam arena elektoral, narasi yang melekat padanya seringkali bersifat polarisasi. Pada Pilpres 2019, misalnya, pertarungan wacana di media sosial secara intens mengasosiasikannya dengan isu khilafah sebagai lawan dari narasi komunisme yang diarahkan kepada rivalnya, Joko Widodo (Aminulloh et al., 2024). Pertemuan dengan para pemred ini, yang terjadi setelah ia memenangkan kontestasi elektoral, dapat dilihat sebagai kelanjutan sekaligus transformasi dari strategi diskursif tersebut. Kini, sebagai pemegang kekuasaan, wacananya tidak lagi hanya bertujuan untuk mobilisasi elektoral, tetapi untuk konsolidasi dan normalisasi kekuasaan. Meskipun demikian, studi-studi terdahulu masih terjebak pada analisis teks searah seperti pidato dan konten media sosial. Belum ada kajian yang secara spesifik membedah bagaimana Prabowo mengelola wacana dalam interaksi dialogis langsung dengan elite media dalam posisi sebagai pemenang pemilu. Kekosongan inilah yang menjadi *gap research* fokus penelitian ini untuk melihat transformasi komunikasi politik dari fase mobilisasi ke fase konsolidasi.

Oleh karena itu, Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuasaan dikonstruksikan dan direproduksi melalui praktik wacana dalam forum dialogis antara Presiden Prabowo dan para pemimpin redaksi media. Format dialog terbuka secara implisit menjanjikan relasi yang simetris, di mana media berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang mengawasi kekuasaan. Namun, kerangka analisis wacana kritis bisa membuat penulis untuk mempertanyakan asumsi ini secara kritis. Wacana tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, ia selalu dibentuk oleh dan membentuk struktur sosial yang lebih luas, termasuk relasi kekuasaan yang tidak setara (Munfarida, 2023). Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk bagaimana mekanisme diskursif yang digunakan dalam pertemuan tersebut, mengungkap bagaimana bahasa, interaksi, dan konteks sosial bekerja secara dialektis untuk meneguhkan hegemoni dan melegitimasi tatanan kekuasaan yang baru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pisau kerangka analisis tiga dimensi dari Norman Fairclough, yang meliputi analisis teks, analisis praktik diskursif, dan analisis praktik sosiokultural (Fairclough, 2014). Dimensi teks akan memfokuskan pada analisis linguistik mendalam terhadap transkrip dialog, memperhatikan pilihan kosakata (diksi), penggunaan metafora, struktur kalimat (transitivitas), dan modalitas untuk mengungkap bagaimana representasi dunia, identitas sosial, dan relasi sosial dikonstruksikan. Dimensi praktik diskursif akan menganalisis proses produksi dan konsumsi wacana ini. Dimensi ini mencakup bagaimana pertemuan tersebut di-framing, bagaimana interaksi tanya-jawab diatur, dan bagaimana media yang hadir kemudian mereproduksi dan merekontekstualisasi wacana tersebut dalam laporan-laporan mereka.

Terakhir, dimensi praktik sosiokultural akan menghubungkan peristiwa wacana ini dengan konteks sosial-politik yang lebih luas, seperti dinamika hubungan sipil-militer pasca-otoritarianisme di Indonesia, meningkatnya kritik terhadap militerisme, dan peran media arus utama dalam konstelasi politik nasional. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menjembatani analisis linguistik mikro dengan analisis sosial makro, memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dalam sebuah peristiwa politik tunggal namun signifikan. Dengan membedah lapisan-lapisan wacana dalam pertemuan Hambalang, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman tentang praktik kekuasaan simbolik dalam demokrasi Indonesia, menunjukkan bagaimana dialog yang tampak terbuka dapat berfungsi sebagai arena canggih untuk reproduksi dominasi. Hal ini tidak hanya memperkaya studi politik diskursif tetapi juga menawarkan refleksi kritis bagi publik dalam mengonsumsi dan menafsirkan komunikasi politik dari para elite.

2. Metode

Kerangka kerja penelitian ini didasarkan pada paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kritis melalui metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap makna di balik penggunaan bahasa dalam konteks sosial-politik yang spesifik, melampaui deskripsi permukaan untuk menemukan hubungan-hubungan yang seringkali tersimpan secara implisit. Sebagai pisau analisis utama, digunakan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Pemilihan model ini didasarkan pada keunggulannya dalam menjembatani analisis linguistik yang rinci dengan teori sosial yang lebih luas, sehingga memungkinkan untuk mengetahui bagaimana kekuasaan,

ideologi, dan struktur sosial dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui bahasa. Analisis wacana kritis memandang wacana sebagai praktik sosial yang berada dalam hubungan dialektis dengan dimensi-dimensi sosial lainnya. Wacana kritis tidak hanya merefleksikan struktur sosial, tetapi juga secara aktif membentuk dan mengubah struktur tersebut. Kerangka ini sangat relevan untuk membedah sebuah peristiwa komunikasi politik elite yang dirancang untuk membentuk persepsi publik dan melegitimasi kekuasaan (Jorgensen & Phillips, 2002)

Objek material dari penelitian ini adalah sebuah teks tunggal (*single text*) yang komprehensif, yakni transkrip video resmi dari pertemuan dialogis antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan enam pemimpin redaksi media nasional yang diselenggarakan pada 6 April 2025. Teks ini, yang mencakup keseluruhan interaksi verbal selama kurang lebih tiga jam, berfungsi sebagai data primer yang kaya akan fitur-fitur linguistik dan interaksional. Pemilihan teks tunggal sebagai fokus utama didasarkan pada argumen dalam kerangka wacana kritis bahwa analisis mendalam terhadap sebuah peristiwa dapat memberikan wawasan signifikan mengenai praktik sosial pada level makro. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, dengan memanfaatkan transkrip yang bersumber dari rekaman video yang telah dipublikasikan secara resmi melalui kanal-kanal media digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin redaksi media menyingkap sebuah arsitektur wacana yang sangat terstruktur. Di balik penampilan dialog yang diklaim santai dan terbuka, tergelar sebuah praktik diskursif yang secara sistematis bekerja untuk membangun, menegosiasikan, dan mereproduksi kekuasaan. Peristiwa ini, ketika dibedah, bukanlah sekadar sesi tanya jawab yang simetris, melainkan sebuah panggung politik yang dirancang dengan cermat. Di panggung ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai medium transmisi informasi, tetapi sebagai instrumen utama untuk membentuk realitas, menaturalisasi ideologi, dan mengukuhkan hegemoni. Dengan menerapkan kerangka tiga dimensi Fairclough, lapisan-lapisan makna dan relasi kuasa dalam interaksi strategis ini dapat diurai, mulai dari pilihan kata-kata pada level mikro, dinamika interaksi pada level meso, hingga implikasinya terhadap struktur sosial-politik Indonesia pada level makro.

3.1. Dimensi Teks

Pada dimensi teks, wacana yang dibangun oleh Prabowo Subianto yang secara strategis merepresentasikan dan melegitimasi agenda kekuasaannya. Pilihan diksi yang konsisten berorientasi pada narasi populis menjadi fondasi utama. Kata-kata seperti "rakyat", "bangsa", "negara", "miskin", "petani", dan "anak-anak" digunakan secara berulang untuk membangun kedekatan emosional dan memposisikan dirinya sebagai representasi tunggal dan pelindung kepentingan kolektif yang termarginalkan. Ia menyatakan dengan tegas,

"saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia" sebuah kalimat yang tidak hanya menjanjikan sebuah kebijakan, tetapi juga mengkonstruksi identitas dirinya sebagai seorang pejuang yang melawan penderitaan. Upaya ini diperkuat dengan narasi personal yang mendalam tentang pengalamannya bertemu rakyat,

"setelah saya melihat mata daripada rakyat kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya merasakan getaran dan mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka". Pilihan kata emotif seperti "getaran" dan "ungkapan" berfungsi mentransformasikan data politik abstrak menjadi sebuah pengalaman sensoris yang otentik dan personal, yang melegitimasi kebijakannya bukan sebagai kalkulasi teknokratis, melainkan sebagai panggilan moral yang lahir dari interaksi langsung dengan denyut nadi rakyat. Penggunaan retorika populis semacam ini, yang mengagungkan rakyat dan menciptakan dikotomi moral antara pemimpin yang peduli dengan sistem yang korup, merupakan ciri khas yang telah teridentifikasi dalam wacana politiknya di masa lalu (Umam, 2025).

Selain diksi populis, strategi pemanusiawian (*humanization*) elite juga disisipkan melalui humor dan berbagai gimik verbal. Interaksi informal di awal acara, seperti perbincangan mengenai kopi Hambalang dengan cinnamon atau candaan tentang hobinya mengoleksi buku dan pedang, berfungsi untuk mencairkan suasana dan secara sengaja mengurangi jarak kekuasaan yang formal.

Ketika ia berkelakar, "mungkin saya harus pakai buzer mulai sekarang" sebagai respons atas kritik komunikasi pemerintah, ia secara efektif mereduksi isu serius mengenai propaganda digital menjadi sebuah lelucon, yang membuatnya tampak santai, terbuka, dan tidak anti-kritik. Gimik tanpa sensor yang digaungkan sejak awal juga merupakan bagian dari strategi ini. Meskipun format acara secara langsung terkendali, klaim ini menciptakan sebuah ilusi keterbukaan total. Praktik linguistik ini, yang oleh Fairclough dapat disebut sebagai demokratisasi wacana (Rumaf et al., 2025), bekerja untuk menyamarkan asimetri kekuasaan,

membangun citra Prabowo sebagai figur yang mudah didekati, memiliki selera humor, dan manusiawi. Hal ini sebuah perbedaan dari persepsi lama tentang dirinya sebagai tokoh militer yang kaku dan otoritatif.

Selanjutnya, wacana kebenaran dan kinerja pemerintah dikontrol secara ketat melalui narasi pengakuan (*acknowledgement*) dan klaim otoritas epistemik. Prabowo secara ekstensif memaparkan capaian 150 hari pemerintahannya bukan sebagai laporan normatif, melainkan sebagai sebuah narasi keberhasilan yang harus diketahui oleh publik, didorong oleh persiapan matang dan eksekusi yang cepat. Ia menggunakan frasa seperti "hasil kerja keras tim saya, kabinet yang saya bentuk" dan "saya cukup bangga dengan apa yang kita capai dalam 150 hari", yang memposisikan kinerjanya sebagai fakta objektif menurut Prabowo. Perkataan repetitif seperti "*execute, execute, execute*" yang diucapkannya menjadi simbol dari pemerintahannya yang berorientasi pada tindakan, bukan wacana. Lebih penting lagi, ia secara strategis menyisipkan otoritas epistemik untuk memperkuat legitimasinya. Pernyataan seperti

"saya kumpulin beberapa pakar inti saya" dan "saya akan kumpulkan ahli hukum" berfungsi untuk menunjukkan bahwa kebijakannya didasarkan pada pengetahuan mendalam dan konsultasi dengan para ahli, bukan keputusan arbitrer. Ketika membahas program makan bergizi, Prabowo bahkan merujuk pada data IQ dari Harvard untuk memberikan landasan saintifik pada program populisnya. Dengan demikian, Prabowo tidak hanya memaparkan hasil, tetapi juga mengklaim kepemilikan atas proses pengetahuan di baliknya, sebuah mekanisme untuk meneguhkan kebenaran versinya sekaligus meminggirkan narasi alternatif sebagai sesuatu yang kurang terinformasi atau bias.

3.2. Dimensi Praktik Diskursif

Pada dimensi praktik diskursif, relasi kuasa dalam pertemuan ini secara jelas termanifestasi dalam genre, format, dan alur interaksi. Meskipun dilabeli sebagai dialog, struktur acara secara fundamental bersifat asimetris. Prabowo Subianto tidak hanya bertindak sebagai narasumber tunggal, tetapi juga sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan acara di kediaman pribadinya di Hambalang, sebuah ruang yang secara simbolis berada di bawah kendalinya. Posisi ini memberinya kekuasaan untuk mengatur agenda dan membingkai diskusi. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana ia membuka sesi dengan monolog yang sangat panjang dan ekstensif, merespons pertanyaan pembuka tentang capaian 150 hari. Jawabannya berkembang menjadi sebuah narasi besar yang mencakup filosofi pembangunan, sejarah pertanian, pengakuan terhadap jasa presiden-presiden sebelumnya, hingga tantangan geopolitik global. Strategi ini, yang dikenal sebagai *topic control*, memungkinkan penutur dominan untuk menetapkan kerangka interpretasi dan memprioritaskan pesannya sendiri sebelum pihak lain sempat mengajukan sanggahan atau interupsi. Ia memegang kendali penuh atas wacana, sementara para jurnalis diposisikan sebagai audiens pertama.

Peran para jurnalis dalam praktik diskursif ini menunjukkan dinamika yang kompleks antara agensi dan keterbatasan struktural. Di satu sisi, beberapa jurnalis mengajukan pertanyaan kritis yang menyentuh isu-isu paling sensitif. Uni Lubis secara langsung menanyakan urgensi RUU TNI dan masalah transparansi prosesnya, sementara Najwa Shihab mempertanyakan potensi perluasan wewenang dalam RUU Kepolisian, mengaitkannya dengan berbagai kasus *abuse of power*. Namun, pertanyaan-pertanyaan tajam ini seringkali berhasil dinetralisir atau dibingkai ulang oleh Prabowo. Ia menjawab kritik terhadap RUU TNI dengan menegaskan bahwa itu bukan isu (*is not issue*) dan menuduh kekhawatiran publik didasari oleh pandangan elite yang bias dan penuh curiga "selalu memandang dengan sakwa sangka dengan curiga". Terhadap pertanyaan mengenai RUU Kepolisian, ia memberikan jawaban yang normatif seperti, "polisi harus diberi wewenang yang cukup" sebelum dengan cepat mengalihkan fokus pada keberhasilan aparat dalam memberantas kejahatan. Di sisi lain, beberapa pertanyaan justru berfungsi sebagai pemicu (*prompt*) bagi Prabowo untuk mengelaborasi narasi keberhasilannya, seperti pertanyaan Alvito Dianova yang memintanya menjelaskan mengapa ia memilih kebijakan fundamental ketimbang proyek monumental. Interaksi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya interogasi kritis, struktur kekuasaan yang timpang dalam forum tersebut membatasi kemampuan media untuk secara efektif menantang wacana dominan.

Pada akhirnya, keseluruhan acara ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah panggung kendali opini (*opinion control stage*) yang sangat efektif. Praktik wacana ini tidak hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi tentang performa *self-representation*. Prabowo secara aktif membangun citranya sebagai pemimpin yang transparan denganungkapkannya yaitu, "tidak ada daftar pertanyaan yang harus kami ajukan"), lalu membangun citra merangkul masyarakat dengan perkataannya "ayo Indonesia incorporated", dan bahkan bersedia mengakui kesalahannya atas sesuatu untuk sedikit mengurangi dominasinya agar publik tidak secara langsung citra yang dibangunnya dengan perkataan, "saya yang bertanggung jawab saya yang salah sebetulnya" terkait buruknya komunikasi pemerintah.

Panggung ini juga dimanfaatkan untuk memproyeksikan citra sebagai seorang *family man* dan pemersatu, dengan menunjuk bagaimana putranya, Didit Hediprasetyo, menjadi jembatan komunikasi dengan keluarga rival-rival politiknya, sebuah metafora kuat untuk rekonsiliasi elite. Proses distribusi wacana setelah acara menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik ini. Dengan mengunggah rekaman penuh ke kanal YouTube resminya dan membiarkan media peserta menyebarkan cuplikan dan laporannya, ia memastikan narasinya

yang terkontrol menjangkau audiens seluas mungkin, seringkali tanpa filter editorial yang kritis. Media, dalam hal ini, bertransformasi dari pengawas menjadi amplifier.

3.3. Praktik Sosiokultural

Pada dimensi praktik sosiokultural menempatkan peristiwa wacana ini dalam konteks sosial-politik Indonesia kontemporer yang lebih luas. Pertemuan Hambalang tidak terjadi dalam kevakuman, lebih dari itu, dialog ini merupakan respons diskursif yang strategis terhadap iklim sosial yang sedang diwarnai oleh kritik dan kekhawatiran publik, terutama mengenai pembahasan RUU TNI dan isu kebangkitan kembali militerisme. Dalam konteks ini, format dialog berfungsi sebagai perisai dialogis (*dialogical shield*). Alih-alih mengeluarkan pernyataan sepihak yang bisa dipersepsikan sebagai pembelaan yang kaku dan otoriter, Prabowo memilih untuk berdialog dengan para pemred media. Praktik ini secara diskursif mentransformasikan sebuah tindakan pembelaan kebijakan (*policy defense*) menjadi sebuah gestur keterbukaan dan akuntabilitas. Pelaksanaan hegemonisasi terjadi pada fenomena ini, di mana kekuasaan yang efektif tidak hanya beroperasi melalui represi, tetapi melalui penciptaan persetujuan (*consent*) (Munfarida, 2023). Dengan menjawab langsung kritik mengenai RUU TNI dan menepis kekhawatiran tentang dwifungsi, ia secara proaktif mengelola krisis persepsi dan menaturalisasi kebijakannya sebagai sesuatu yang logis dan perlu untuk stabilitas organisasi negara. Ia juga membuat narasi tandingan bahwa TNI adalah lembaga yang paling dipercaya rakyat dan bahwa perubahan tersebut bersifat teknis dan mendesak untuk menjaga efektivitas kepemimpinan.

Dengan begitu wacana dominan bekerja, ia tidak mengabaikan wacana alternatif, melainkan mengakuinya untuk kemudian menaturalisasikannya sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bias. Kekuasaan simbolik, sebagaimana digagas Bourdieu, bekerja di sini dengan mengubah relasi kuasa yang arbitrer menjadi tampak sah dan wajar (Rumaf et al., 2025). Dengan demikian, perisai dialogis ini berfungsi untuk meredam kritik dan memperkuat legitimasi kebijakan yang kontroversial.

Lebih dari itu, praktik wacana ini merupakan bagian integral dari proyek reposisi diri Prabowo Subianto yang telah berlangsung sejak transisi kekuasaannya. Mengingat jejak historisnya yang kuat sebagai figur militer yang seringkali diasosiasikan dengan Orde Baru, wacana yang ia bangun dalam pertemuan ini secara konsisten bertujuan untuk mengkonstruksi ulang identitasnya sebagai seorang tokoh sipil-demokratis (Megawati, 2021). Fairclough (2013) menegaskan bahwa wacana bersifat *constitutive*, artinya ia tidak hanya merefleksikan identitas tetapi juga menciptakannya. Dalam dialog ini, Prabowo secara aktif menciptakan identitas barunya. Prabowo pun berulang kali memuji jasa para pendahulunya, sebuah strategi rekonsiliasi yang mencakup rival-rival politiknya di masa lalu seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Tindakan ini menempatkannya dalam sebuah garis suksesi kepemimpinan nasional yang sah dan inklusif, bukan sebagai figur yang datang untuk membongkar tatanan. Ia juga secara eksplisit menegaskan komitmennya pada supremasi sipil dengan mengingatkan audiens bahwa ia pernah diberhentikan oleh Presiden sipil B.J. Habibie dan ia mematuhi. Narasi ini, yang diperkuat dengan penggunaan diksi seperti "kolaborasi", "kerukunan", dan ajakan untuk bekerja sama dengan semua pihak termasuk aktivis yang dulu melawannya, bekerja secara efektif untuk membongkar citra lama dan membangun citra baru sebagai pemimpin yang pragmatis dan negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Proses ini mencerminkan bagaimana identitas politik bersifat dinamis dan selalu berada dalam proses ingin menjadi apa (*becoming*) dan dibentuk dengan menghubungkan elemen-elemen diskursif yang berbeda. Prabowo mengartikulasikan citra mantan militer dengan nilai-nilai demokratis dan sipil, menciptakan sebuah identitas hibrida yang dirancang untuk memperluas basis penerimaannya dalam lanskap politik pasca-reformasi.

Lalu, peristiwa ini juga merefleksikan dan sekaligus mereproduksi relasi simbiosis antara kekuasaan politik dan kekuasaan media di Indonesia. Dalam pertemuan ini, media arus utama tidak diposisikan sebagai penantang (*challenger*) kekuasaan yang independen, melainkan sebagai mitra dialog yang pada akhirnya menjadi *co-producer* dari narasi elite. Fairclough (2014) menyoroti kekuasaan tersembunyi media massa, di mana praktik jurnalistik yang tampak netral sekalipun dapat mereproduksi ideologi dominan.

Dengan menerima undangan, berpartisipasi dalam format yang telah ditentukan, dan kemudian menyebarluaskan kontennya, media secara tidak langsung menjadi perpanjangan tangan dari agenda wacana kepresidenan. Kehadiran para pemimpin redaksi dari media memberikan platform dan stempel legitimasi bagi narasi yang dibangun oleh Prabowo, yang kemudian menjangkau jutaan audiens di seluruh negeri. Fenomena ini menggambarkan bagaimana hegemoni, dalam pengertian Gramscian, bekerja secara efektif. Yang dimana, kekuasaan dipertahankan bukan melalui paksaan, melainkan melalui penciptaan konsensus di mana institusi-institusi sosial kunci—dalam hal ini media—berpartisipasi, secara sadar atau tidak, dalam menyebarkan pandangan dunia dari kelompok yang dominan (Munfarida, 2023). Dari sudut pandang ekonomi politik media, akses eksklusif seperti ini merupakan komoditas berharga yang dapat meningkatkan citra dan jangkauan media

itu sendiri. Namun, dari sudut pandang kritis, relasi ini berisiko mengaburkan fungsi pengawasan media. Praktik sosial ini menunjukkan adanya potensi pergeseran peran media dari pilar keempat yang kritis menjadi agen sosialisasi bagi wacana kekuasaan yang mapan, sebuah dinamika yang memiliki implikasi mendalam bagi kesehatan demokrasi deliberatif di Indonesia. Alih-alih menjadi ruang kontestasi ide, ruang publik yang dimediasi oleh praktik semacam ini berisiko menjadi ruang afirmasi bagi wacana tunggal yang berasal dari pusat kekuasaan.

4. Kesimpulan

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin redaksi media di Hambalang, meskipun dibingkai sebagai sebuah dialog yang transparan dan setara, pada hakikatnya merupakan sebuah praktik wacana yang bersifat hegemonik, bukan simetris. Analisis kritis terhadap peristiwa ini menyingkap bagaimana bahasa dan interaksi secara strategis dimanfaatkan bukan untuk membuka ruang perdebatan yang otentik, melainkan untuk menata ulang legitimasi, mengendalikan narasi publik, dan pada akhirnya mereproduksi struktur kekuasaan yang dominan. Keterbukaan yang ditampilkan bukanlah substansi, melainkan sebuah fasad diskursif yang dikelola dengan cermat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang spesifik.

Pada level tekstual, bahasa digunakan sebagai instrumen utama untuk memanipulasi persepsi dan membangun kedekatan. Pilihan diksi populis, penggunaan humor serta gimik informal, dan klaim otoritas epistemik melalui pemaparan data yang terperinci, semuanya bekerja secara sinergis untuk mengkonstruksi citra seorang pemimpin yang merakyat, manusiawi, dan sangat kompeten. Secara praksis, dinamika interaksi dalam forum tersebut secara gamblang menunjukkan bagaimana kontrol atas wacana dipertahankan. Format acara yang asimetris, di mana Presiden Prabowo menjadi tuan rumah sekaligus narasumber tunggal, memberinya kekuasaan untuk mengatur agenda, mengalihkan pertanyaan-pertanyaan kritis, dan mendominasi alur percakapan. Praktik ini merupakan bagian dari proyek reposisi diri yang lebih besar, yakni mentransformasikan identitas politiknya dari figur masa lalu yang polarisasi menjadi seorang negarawan pemersatu yang demokratis. Dalam proses ini, media massa tidak tampil sebagai pilar keempat yang menantang kekuasaan. Sebaliknya, melalui partisipasi mereka, mereka menjadi ko-produsen yang secara tidak langsung melegitimasi dan menyebarluaskan narasi yang telah dirancang oleh pusat kekuasaan.

Praktik dialog simbolik yang terkendali seperti ini memiliki risiko untuk menggantikan esensi demokrasi deliberatif, di mana kebijakan publik seharusnya lahir dari perdebatan yang bebas dan setara. Ketika ruang publik yang dimediasi oleh elite media dan elite politik berubah menjadi panggung untuk pertunjukan kekuasaan, maka fungsi pengawasan publik menjadi tumpul dan akuntabilitas menjadi kabur. Peristiwa Hambalang, dengan demikian, dapat dilihat sebagai sebuah mikrokosmos dari sebuah tren yang lebih luas dalam politik kontemporer yaitu pergeseran teknik kekuasaan dari represi yang kasat mata ke arah manajemen wacana yang canggih. Pertarungan politik tidak lagi hanya terjadi di ranah elektoral, tetapi juga—dan mungkin yang lebih penting—di arena diskursif, di mana pertarungan sesungguhnya adalah untuk menguasai makna dan realitas itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Aminulloh, A., Myrtati, D. A., & Emei, D. S. (2024). Propaganda and Myth: Discourse Battle on Social Media in the Indonesian Presidential Election. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 202–217. <https://doi.org/10.33366/jkn.v%vi%i.2130>
- Bakanova, A. (2021). Russian-Ukrainian Conflict In The Context Of The Use Of "Hard Power" In International Relations Of The XXI Century. *Evropsky Politicky A Pravni Diskurz*, 8(1), 33-39, ISSN 2336-5447, <https://doi.org/10.46340/eppd.2021.8.1.5>
- Bessner, D. (2024). Introduction: Rethinking U.S. World Power—Domestic Histories of U.S. Foreign Relations. *Rethinking U S World Power Domestic Histories of U S Foreign Relations*, 1-14, https://doi.org/10.1007/978-3-031-49677-6_1
- Chernega, V.N. (2023). The Evolution of Franco-German Relations in 1949–2022: From the German Problem to the Franco-German Tandem and the Idea of the “Power of Europe”. *Novaya I Novejshaya Istoriya*, 67(4), 151-166, ISSN 0130-3864, <https://doi.org/10.31857/S013038640024674-9>
- Debono, M. (2023). Justice in Dialogic Education: The Hegemonic Use of “Truth” in Dialogue and Its Educational Limits. *Justice Education and the World of Today Philosophical Investigations*, 80-96, <https://doi.org/10.4324/9781003327332-8>

- Dockter, A.W. (2022). Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill: Power relations. *Palgrave Handbook of Presidents and Prime Ministers from Cleveland and Salisbury to Trump and Johnson*, 133-155, https://doi.org/10.1007/978-3-030-72276-0_7
- Dudek-Waligóra, G. (2025). Creating an enemy as a feature of ideological discourse: The case of contemporary Russian power in relation to Ukraine. *Routledge Handbook of the Sociopolitical Context of Language Learning*, 259-273, <https://doi.org/10.4324/9781003398172-19>
- Fairclough N. (2014). *Language and Power: 3rd Edition*. Routledge.
- Galbraith, J. (2021). From Scope to Process: The Evolution of Checks on Presidential Power in US Foreign Relations Law. *Encounters Between Foreign Relations Law and International Law Bridges and Boundaries*, 239-251, <https://doi.org/10.1017/9781108942713.012>
- Jorgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. SAGE Publications Ltd.
- Megawati, E. (2021). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Dan Wodak Pada Pidato Prabowo. *Kandai Journal*, 17(1), 75. <https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.1551>
- Mendez, C.P. (2021). International Relations and football: limits and possibilities for China to become a global football power by 2050. *Estudos Internacionais*, 9(4), 7-24, ISSN 2317-773X, <https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2021V9N4P7-24>
- Munfarida. (2023). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Jurnal Komunika*, 8, 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Rantes-García, G.M. (2023). Digital Activism on YouTube. The Representation of Power and Counter-Power Relations in a Video Activism Piece During the Second Round of the 2021 Presidential Elections in Peru. *Smart Innovation Systems and Technologies*, 318, 191-200, ISSN 2190-3018, https://doi.org/10.1007/978-981-19-6347-6_17
- Rumaf, N., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., Sastromiharjo, A., Fatihaturrahmah, S., & Jumroh, A. (2025). Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, 11, 2111–2124. <https://e-journal.my.id/onoma>
- Şahin, D. (2024). Power Plays in the Eastern Mediterranean And the Decline of US-Turkey Relations. *Middle East Policy*, 31(4), 125-139, ISSN 1061-1924, <https://doi.org/10.1111/mepo.12785>
- Shipilov, A. (2025). Great Power Competition over the Establishment of Soviet-Liberian Relations (1956—1962) (Based on Unpublished Russian and U.S. Archival Materials). *Istoriya*, 16(3), ISSN 2079-8784, <https://doi.org/10.18254/S207987840035351-5>
- Snyder, N. (2023). American Civil–Military Relations and Presidential Power of Removal. *Armed Forces and Society*, 49(3), 559-592, ISSN 0095-327X, <https://doi.org/10.1177/0095327X221100270>
- Teubert, W. (2021). A mural that helped to bring down Jeremy Corbyn: How hegemonic discourse silences dialogue. *Language and Dialogue*, 11(2), 300-331, ISSN 2210-4119, <https://doi.org/10.1075/ld.00097.teu>
- Umam K. (2025). Jalla Populism And The Language Of Power: An Analysis Of Critical Discourse On The Political Speech Of The President Of The Republic Of Indonesia. *Jalla, Volume 1, No. 1*, 30–40.